



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Alamat : Jalan Pangeran Kesuma Negara (Gedung Abdi Negara Lt. 3) Kotabaru-Kalimantan Selatan 72111
Telp/Fax. (0518)21438 Email : diskominfo@kotabarukab.go.id

RENCANA KERJA PERUBAHAN PENETAPAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

RENJA-P PENETAPAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-NYA, maka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 dapat disusun sesuai jadwal dan aturan-aturan yang berlaku.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru ini dibuat sebagai Pedoman Perencanaan Pembangunan Komunikasi Dan Informatika di Kabupaten Kotabaru untuk tahun 2023 dan merupakan bentuk implementasi dari Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023 ini disusun dan disampaikan untuk menjadi pedoman awal pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023. Untuk kesempurnaan sebuah Renja, sangat diharapkan masukan yang konstruktif dan atas kerjasamanya dari berbagai pihak kami mengucapkan terima kasih.

Kotabaru, September 2023
Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kotabaru,

Ir. KAMIRUDIN, M, Si
NIP. 19661222 199503 1 004
Pembina Utama Muda (IV/c)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB. II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	14
2.2. Faktor Pendorong dan Penghambat	18
BAB. III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan	23
BAB. IV. PENUTUP	26
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Alur penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023	3
------------	--	---

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II (Bulan Juni) Tahun 2023 (Form E.81)	14
Tabel. 2.2.	Faktor Pendorong dan Penghambat	18
Tabel 3.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Berdasarkan Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2023	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru, eksistensinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan **Peraturan Bupati (PERBUP)** Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Kotabaru. Sebelumnya Sektor Komunikasi Dan Informatika telah melebur kedalam Sektor Perhubungan, dengan nama Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika. Sebagai unsur Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang komunikasi dan informasi, meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melewati media, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses kesegnap fungsi layanan pemerintah dari satu wilayah/lokasi secara efektif dan efisien merupakan arah yang akan dicapai dalam penerapan *e-government*. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Maksud dari Inpres tersebut adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Konsep pembangunan komunikasi dan informatika masa depan harus dirumuskan secara komprehensif, dimana dapat mengantisipasi berbagai tantangan, seperti kebijakan global dan otonomi daerah, salah satu model yang dapat mengantisipasi tantangan perubahan global adalah pengembangan sistem

komunikasi dan informatika yang berkelanjutan (*sustainable communication and information*).

Pemerintah mempunyai peran sebagai eksekutor dan regulator dalam menciptakan sistem komunikasi yang demokratis. Sebagai eksekutor pemerintah memfasilitasi dan menyediakan ruang dan saluran/media yang diperlukan untuk menyampaikan informasi kepada elemen masyarakat, dan sebagai regulator, pemerintah juga dapat mengharuskan pihak swasta dalam peran melaksanakan komunikasi publik yang sesuai dengan tujuan mencerdaskan masyarakat.

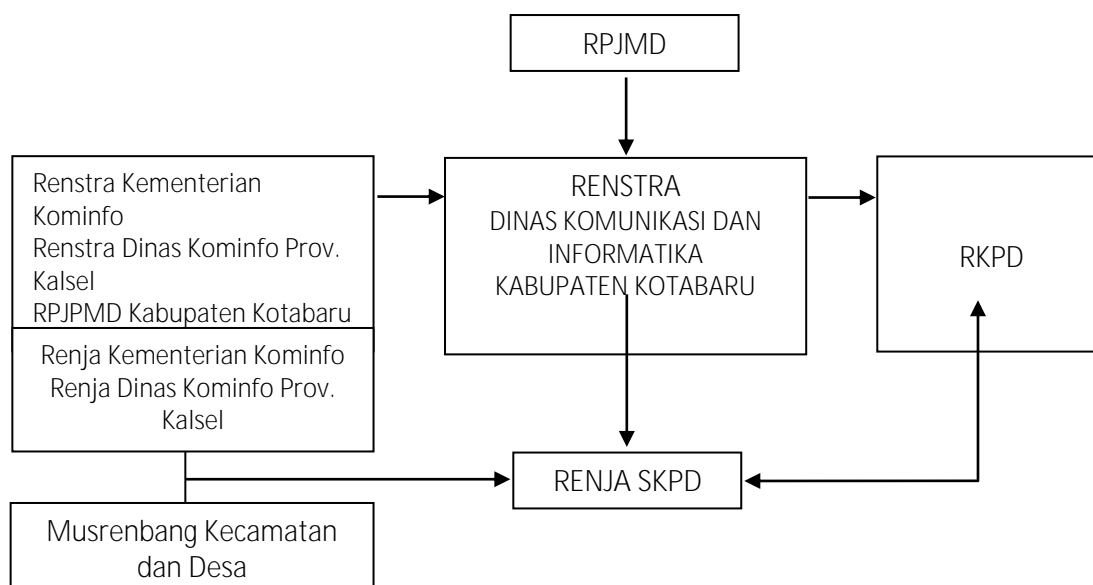
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra - PD), yang ditindaklanjuti dengan proses penjabaran untuk setiap tahunnya kedalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD).

Rencana Kerja SKPD adalah Penjabaran Rencana Strategis SKPD yang memuat segala bentuk kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Berdasarkan hal-hal tersebut sangat diperlukan penyusunan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru sebagai dokumen manajemen strategis.

Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berorientasi pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru, dan sebagai pedoman teknis dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan komunikasi dan informatika, sehingga dituntut lebih optimal dalam upaya untuk mendekatkan pelayanan secara prima kepada masyarakat, untuk itu peranan pembangunan komunikasi dan informatika di Kabupaten Kotabaru tetap eksis menjadi andalan dalam mendukung sektor pariwisata dan pengembangan agrobisnis yang merupakan visi Kabupaten Kotabaru.

Alur penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1. Alur Penyusunan Renja



Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai salah satu dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan yang disusun berdasarkan fungsi pemerintah. Pemantapan perencanaan melalui Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2023, merupakan suatu langkah atau upaya untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan komunikasi dan informatika serta mewujudkan agenda pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Penetapan program, kegiatan dan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) pembangunan komunikasi dan informatika. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika yang merupakan jabaran dari Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945

serta landasan Operasional dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pembangunan daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996. Tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, serta bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN. 2017/No. 77);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang(LN.2021/No.31);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I – 5 Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
32. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
34. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (BN.2020/No. 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022, Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 14);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Tanggal 21 Oktober 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);
 49. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 28);
 50. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 55 Tahun 2017 tanggal 15 November 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru.
 51. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
 53. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 8);
 54. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 2).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Kedudukan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2023, merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru. Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika disusun dengan maksud sebagai pedoman resmi secara teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun kedepan, adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika adalah:

1. Merumuskan program-program strategis dan prioritas yang berbasis pada sumberdaya lokalit guna pengembangan sektor komunikasi dan informatika guna mendukung pembangunan pariwisata dan agrobisnis.
2. Menyusun tolok ukur dalam menilai dan mengevaluasi Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru sebagai manifestasi pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotabaru, yang berbasis pada pengembangan teknologi komunikasi dan informatika dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Mengarahkan pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika menuju sektor komunikasi dan informatika yang tangguh dalam rangka pengembangan pembangunan di Kabupaten Kotabaru dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
4. Memungkinkan Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan sektor komunikasi dan informatika dalam pembangunan perekonomian di masa mendatang dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru disusun berdasarkan potensi wilayah dengan cara memaksimalkan keunggulan kompetitif daerah dan meminimalkan kelemahan internal, yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2021-2026, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang pelaksanaannya dilakukan melalui dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten serta memungkinkan dukungan APBD Provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sistematika Penulisan Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru adalah :

BAB I PENDAHULUAN.

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.

Memuat Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai dengan triwulan II (form E.81) dengan mengacu pada APBD tahun 2023 (disajikan dalam Tabel 2.1).

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang penjabaran dari Tabel Perubahan Pendanaan dan Rencana Kerja dari lampiran Renja.

BAB IV PENUTUP.

Menguraikan tentang hal-hal penting yang perlu mendapatkan atensi, baik dalam rangka pelaksanaan rencana kerja SKPD, yang memuat kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Eksistensi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan **Peraturan Bupati (PERBUP)** Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Kotabaru. Dinas Komunikasi Dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengembangan pusat pertumbuhan dengan pembentukan kawasan sentra dipercepat dengan pengalokasian dana profesional yang seimbang disetiap bidang dalam Perangkat Daerah, dengan Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana. Permasalahan yang akan terus selalu dihadapi dan menjadikannya sebuah tantangan yang merupakan aspek berkelanjutan, yaitu dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, serta meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat akan berpengaruh terhadap pola hidup atau gaya hidup. Kondisi ini akan berdampak terhadap tingginya tingkat penggunaan teknologi, termasuk teknologi komunikasi dan informatika. Sementara itu kemampuan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang masih belum memadai, karena keberhasilan pembangunan sektor komunikasi dan informatika sangat tergantung dari efektivitas kegiatan bidang dalam Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten Kotabaru di bidang komunikasi dan informasi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggung-jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penetapan Kinerja Tahun 2023 merupakan komitmen seluruh unsur dinas, untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dokumen ini memuat program dengan indikator kinerja sasaran. Program adalah rencana jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan/sasaran. Adapun uraian sasaran maupun target-target yang dicapai pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan II terkait dengan pelaksanaan program-program di bidang komunikasi dan informatika tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. *Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II (Bulan Juni)Tahun 2023 (form E.81)*

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
 - I. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 55,56%
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 60%
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sampai dengan triwulan I telah terealisasi sebesar 66,67%
 4. Fasilitas Kunjungan Tamu sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 52%
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 86%
 - II. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 50,71%
 - III. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 100%
 - IV. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 100%
 - V. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 59,62%
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
 - I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 50%
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 50%
 - II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 50%
 - III. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 50%
- IV. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 50%
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 50%
- V. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 50%
 2. Membangun Metadata Statistik Sektor sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 50%
- c. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
 - I. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 47,14%
 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
 3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
 - II. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
 - III. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 43,21%
 - IV. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
 - V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 41,67%
 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 40%

- V. *Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota*
 - 1. Pelayanan Informasi Publik sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 44,44%
 - 2. Layanan Hubungan Media sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 45,16%
 - 3. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
 - VI. *Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota*
 - 1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
 - VII. *Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota*
 - 1. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
 - 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
 - VIII. *Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*
 - 1. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor di Daerah sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
 - IX. *Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota*
 - 1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 23,33%
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan , yaitu :
- 1. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Karena Terkendala Penunjukan Kepala Dinas jadi GU Terhambat.
 - 2. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Karena proses pelaksanaan baik itu kegiatan yang bersifat rutin maupun pengadaan sarana dan prasarana masih dalam proses.
 - 3. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Karena proses pelaksanaan pada Triwulan III.
 - 4. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Karena proses pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya masih dalam proses.

5. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Karena pembayaran kontrak media belum dilaksanakan dan dibayarkan setelah dibulan juli.
 6. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Karena masih dalam proses pelaksanaan.
 7. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Karena akan dilaporkan di Triwulan III.
 8. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Karena kegiatan sosialisasi belum terlaksana.
 9. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Karena adanya 1 kegiatan yang dirubah menjadi sosialisasi di Triwulan III.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD Mengingat pada beberapa program/kegiatan yang belum memenuhi target yang di susun maka berdampak terhadap :
1. Belum Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik
 2. Belum Optimalisasi pelaksanaan penerapan e-government
 3. Belum Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral
 4. Belum Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda
 5. Belum Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan persandian
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

Tabel 2.2
Faktor Pendorong dan Penghambat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi			

	Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan; Tersedianya alokasi anggaran kegiatan	Masih perlunya penambahan pagu anggaran kegiatan	Melakukan koordinasi dan pengusulan penambahan anggaran
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan; Tersedianya alokasi anggaran kegiatan	Penyesuaian perhitungan anggaran gaji dan tunjangan PNS berupa belanja tunjangan fungsional PNS dilakukan langsung oleh SKPD; masih perlunya penambahan pagu anggaran kegiatan	Melakukan koordinasi dan pengusulan penambahan anggaran
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah			
7	Pegadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ; Tersedianya alokasi anggaran kegiatan		
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ; Tersedianya alokasi anggaran kegiatan	Masih perlunya penambahan pagu anggaran kegiatan	Melakukan koordinasi dan pengusulan penambahan anggaran
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ; Tersedianya alokasi anggaran kegiatan	Masih perlunya penambahan pagu anggaran kegiatan	Melakukan koordinasi dan pengusulan penambahan anggaran
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ; Tersedianya alokasi anggaran kegiatan	Masih perlunya penambahan pagu anggaran kegiatan	Melakukan koordinasi dan pengusulan penambahan anggaran
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
23	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
24	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ;	1. Kekurangan dana untuk kegiatan peliputan ke kecamatan dan koordinasi ke luar	Peningkatan anggaran untuk memaksimalkan tercapainya program publikasi
25	Layanan Hubungan Media			

26	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya alokasi anggaran kegiatan	daerah 2. Kekurangannya SDM 3. Belum Memadai Peremajaan alat pendukung kegiatan peliputan	Peningkatan Peremajaan alat pendukung Penambahan pagu anggaran untuk perekrutan sdm baru penunjang kegiatan
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
27	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ; Tersedianya alokasi anggaran kegiatan	Pengadaan yang sama telah dilaksanakan di APBD perubahan di 2021	Anggaran pengadaannya dialihkan pada belanja yang lain di kegiatan yang sama
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
28	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			
29	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ; Tersedianya alokasi anggaran kegiatan	Biaya pembuatan dokumen Peta rencana SPBE tidak mencukupi dengan anggaran yang tersedia	Dialihkan pada pembuatan dokumen manajemen keamanan informasi dengan anggaran yang tersedia
30	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			

31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ; Tersedianya alokasi anggaran kegiatan	Seringnya pejabat yang dihubungi tidak ada ditempat	Menjadwalkan ulang koordinas dilain kesempatan
32	Membangun Metadata Statistik Sektoral			
33	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
34	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
35	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ; Tersedianya alokasi anggaran kegiatan	Karena Provinsi belum melaksanakan sosialisasi Indeks Mandiri tersebut	Maka anggaran kegiatan sosialisasi tersebut kami alihkan ke kegiatan lain diwaktu perubahan anggaran

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru yang merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pelayanan di urusan informasi dan komunikasi, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sektor komunikasi dan informatika akan terus berlanjut dan di prioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru, dalam rangka mewujudkan misi 3, yaitu : "Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan

Yang Baik Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Melayani, Akuntabel dan Transparan" yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD berdasarkan urusan, yang menjadi bagian urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar, meliputi :

- I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , dengan program prioritas :
 1. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
 2. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
- II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK, dengan program prioritas :
 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
- III. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN, dengan program prioritas
 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
- IV. NON URUSAN, dengan program prioritas
 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Dalam rangka mengoptimalkan program-program tersebut diatas, tentu kegiatan dan sub kegiatannya tetap merupakan kelanjutan dari kebijakan percepatan dan peningkatan produktivitas melalui pengembangan teknologi komunikasi dan informatika yang difokuskan dengan mengakomodir icon-icon yang menjadi visi, misi, tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan daerah.

Dalam rencana pendanaan program dan kegiatan yang akan di laksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru dapat di kelompokkan menjadi dua sasaran program dan kegiatan yang terdiri dari :

- 3.1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkenaan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Komunikasi dan Informasi

Dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2023, yang berisikan program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan yang ditetapkan. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan difokuskan untuk pencapaian tujuan meningkatkan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran meningkatnya pengembangan dan pengelolaan peta pemerintahan berbasis e-government, meningkatnya penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas data statistik sektoral Kabupaten Kotabaru yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, dalam rangka upaya pencapaian indikator kinerja utama dalam Renja Perubahan Kabupaten Kotabaru tahun 2023, untuk melihat rencana program dan kegiatan prioritas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tergambar pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Berdasarkan Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kotabaru Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 merupakan dasar perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) untuk kurun waktu satu tahun kedepan dalam rangkaian enam tahun program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra. Penyusunan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan dan/atau ketidak-berhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman perencanaan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru yang bersifat teknis dan strategis untuk 1 (satu) tahun kedepan.

Perubahan lingkungan strategis yang tidak terduga, merupakan kendala yang dihadapi, sehingga kebijakan dan program yang telah dirumuskan dalam rencana kerja tentunya akan menjadi penghambat dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 merupakan tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan tahun kedua Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sehingga diperlukan dan dipersiapkan SDM Komunikasi dan Informatika yang handal dan profesional yang didukung dengan sarana prasarana, mobilitas, anggaran dan kebijakan stakeholder.

Kotabaru, September 2023
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotabaru

Ir. KAMIRUDIN, M, Si
NIP. 19661222 199503 1 004
Pembina Utama Muda (IV/c)

Tabel 21.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
sampai dengan Trivulan II (Bulan Juni)Tahun 2023

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Sasaran/ Program dan Kegiatan	Realisasi Kinerja Sasaran/ Program dan Kegiatan s/d Bulan Juni	Persentase Sasaran, Program dan Kegiatan 2023 (%)	Persentase Sasaran, Program dan Kegiatan 2021- 2026 (%)
					NON URUSAN					
X	XX	01			PROGRAMPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	100%	100%	100%	100%
X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	100%	100%
X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00	50,00
X	XX	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00	50,00
X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%

X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	6 Bulan	5000	5000
X	XX	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	560 Kali	264 Kali	47.14	50.51
X	XX	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	- Dokumen	000	4000
X	XX	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	- Dokumen	000	4000
X	XX	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
X	XX	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	- Paket	000	000
X	XX	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	- Orang	000	000
X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%

X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Jenis	5 Jenis	55.56	55.56
X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Buah (Unit/Buah)	15 Buah (Unit/Buah)	60.00	51.53
X	XX	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan logistik kantor	3 Paket	2 Paket	66.67	53.33
X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18183 Buah	9100 Buah	50.05	49.96
X	XX	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	1400 Eksemplar	605 Eksemplar	43.21	48.64
X	XX	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	50 Paket	26 Paket	52.00	50.40
X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Oh	172 Oh	86.00	53.81
X	XX	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%
X	XX	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	- Unit	0.00	0.00

X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%
X	XX	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	353 Surat	179 Surat	50.71	50.14
X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	84 Kali	35 Kali	41.67	48.33
X	XX	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	20 Kali	8 Kali	40.00	46.67
X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48 ob	24 ob	50.00	47.36
X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	100%	100%	100%
X	XX	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Paket	1 Paket	50.00	50.00

X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	2 Paket	1 Paket	5000	5000
X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10000	10000
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	95%	95%	95%	95%
2	16	02	201		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik	4 Nilai Skors Indeks	4 Nilai Skors Indeks	4 Nilai Skors Indeks	4 Nilai Skors Indeks
2	16	02	201	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelayanan Informasi Publik	3600 Eksemplar	1600 Eksemplar	44.44	80.73
2	16	02	201	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	31 Media	14 Media	4516	4516

2	16	02	201	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	- Unit	000	000
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika di Pemkab. Kotabaru	100%	100%	100%	100%
2	16	03	201		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Nama Sub Domain di Lingkup Pemkab. Kotabaru	100%	100%	100%	100%
2	16	03	201	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	- Dokumen	000	000
2	16	03	202		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan E - Government di Lingkungan Pemda Kab Kotabaru	54%	54%	54%	54%

2	16	03	202	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	10000	10000
2	16	03	202	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	- Dokumen	000	000
2	16	03	202	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	- Dokumen	000	000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%
2	20	02	201		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	5 dokumen	5 dokumen	100%	100%

2	20	02	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi data Statistik Sektoral	2 Dokumen	¹ Dokumen	5000	5000
2	20	02	201	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Membangun Metadata Statistik Sektoral	2 Dokumen	¹ Dokumen	5000	5000
2	20	02	201	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1 Sosialisasi	- Sosialisasi	000	4000
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	62%	62%	62%	62%
2	21	02	201		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sistem keamanan informasi	68,97%	68,97%	68,97%	68,97%

2	21	02	201	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52 Laporan	31 Laporan	59.62	59.62
2	21	02	201	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	30 Laporan	7 Laporan	23.33	23.33

Tabel 31
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
Berdasarkan Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kotabaru Tahun 2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan /Sub	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub/Kegiatan	RKPD 2023			RKPD Perubahan 2023			Selisih	
								Target	Pekerjaan (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pekerjaan (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)	
37	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kotabaru	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai	100%	6.118.090.289	6.118.090.289	100%	6.835.129.398	6.835.129.398	13.945.333.441	4.704.972.697
	2	16	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	90.999.741	90.999.741	100%	90.999.361	90.999.361		(380)
					Sub Kegiatan :										
1	2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	47.539.583	47.539.368	47.539.368		(215)
2	2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	dokumen	43.460.158	43.459.993	43.459.993		(165)
	2	16	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.546.523.501	4.546.523.501	100%	4.324.043.447	4.324.043.447	(222.480.054)
					Sub Kegiatan :										
3	2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	4.106.870.317	4.106.870.317	3.923.870.317	3.923.870.317	(183.000.000)
4	2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	560	kali	429.653.568	429.653.568	390.173.780	390.173.780	(39.479.788)
5	2	16	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	dokumen	4.999.819	4.999.653	4.999.653	4.999.653	(166)
6	2	16	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kotabaru	Jumlah penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1	dokumen	4.999.797	4.999.697	4.999.697	4.999.697	(100)
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	114.705.000	114.705.000	100%	104.570.000	104.570.000	(10.135.000)
					Sub Kegiatan :										

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)		
7	2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kotabaru	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	Paket	35,000,000	35,000,000	1	Paket	35,000,000	35,000,000	-
8	2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	6	Orang	79,705,000	79,705,000	6	Orang	69,570,000	69,570,000	(10,135,000)
	2	16	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	paket	569,455,417	569,455,417	1	paket	1,047,996,540	1,047,996,540	478,541,123
						Sub Kegiatan :											
9	2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	9	Jenis	12,983,868	12,983,868	9	Jenis	12,983,868	12,983,868	-
10	2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25	unit/buah	25,519,544	25,519,544	25	unit/buah	36,047,667	36,047,667	10,528,123
11	2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	3	Paket	113,489,115	113,489,115	3	Paket	128,489,115	128,489,115	15,000,000
12	2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kotabaru	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	18183	Buah	19,982,900	19,982,900	18183	Buah	25,082,900	25,082,900	5,100,000
13	2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1400	Eksemplar	7,000,000	7,000,000	1400	Eksemplar	7,000,000	7,000,000	-
14	2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kotabaru	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	50	Paket	4,997,000	4,997,000	50	Paket	4,997,000	4,997,000	-
15	2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200	Oh	385,483,000	385,483,000	200	Oh	833,396,000	833,396,000	447,913,000
	2	16	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kotabaru	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%		100,000,000	100,000,000	100%		218,654,900	218,654,900	118,654,900
						Sub Kegiatan :											-
16	2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	unit	100,000,000	100,000,000	0	unit	-	-	(100,000,000)
17	2	16	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	0	unit	-	-	6	unit	218,654,900	218,654,900	218,654,900
	2	16	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotabaru	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		329,865,580	329,865,580	100%		481,983,200	481,983,200	152,117,620
						Sub Kegiatan :											-

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)		
18	2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	353	surat	4,500,000	4,500,000	353	surat	9,500,000	9,500,000	5,000,000
19	2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84	kali	187,385,580	187,385,580	84	kali	255,533,200	255,533,200	68,147,620
20	2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	20	kali	19,990,000	19,990,000	20	kali	19,990,000	19,990,000	-
21	2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	48	ob	117,990,000	117,990,000	48	ob	196,960,000	196,960,000	78,970,000
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotabaru	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		366,541,060	366,541,060	100%		566,881,950	566,881,950	200,340,900
						Sub Kegiatan :											
22	2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2	paket	57,167,600	57,167,600	2	paket	86,750,000	86,750,000	29,582,400
23	2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2	paket	114,373,450	114,373,450	2	paket	140,131,950	140,131,950	25,758,500
24	2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	195,000,000	195,000,000	1	unit	340,000,000	340,000,000	145,000,000
	2	16	02			PROGRAMINFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Kotabaru	Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	99%		2,687,272,461	2,687,272,461	99%		6,015,118,282	6,015,118,282	3,327,845,821
	2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kota, kabupaten, Kota	Kab. Kotabaru	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4 Nilai Skors Indeks		2,687,272,461	2,687,272,461	4 Nilai Skors Indeks		6,015,118,282	6,015,118,282	3,327,845,821
						Sub Kegiatan :											
25	2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kotabaru	Jumlah pelayanan informasi publik	3600	Eksemplar	148,079,941	148,079,941	3600	Eksemplar	204,482,212	204,482,212	56,402,271
26	2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Kab. Kotabaru	Jumlah layanan hubungan media	31	Media	2,129,787,887	2,129,787,887	31	Media	3,823,956,277	3,823,956,277	1,694,168,390
27	2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Kab. Kotabaru	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan	1	Unit	409,404,633	409,404,633	1	Unit	1,986,679,793	1,986,679,793	1,577,275,160
	2	16	03			PROGRAMAPLIKASI INFORMATIKA	Kab. Kotabaru	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika di Pemkab. Kotabaru	100%		434,997,994	434,997,994	100%		1,095,085,761	1,095,085,761	660,087,767

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)
	2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Persentase Pengelolaan Nama Sub Domain di Lingkup Pemkab. Kotabaru	100%	121,832,294	121,832,294	100%	552,211,046	552,211,046	430,378,752
					Sub Kegiatan :									-
28	2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	121,832,294	121,832,294	1 Dokumen	337,350,117	337,350,117	215,517,823
29	2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	20 domain dan sub domain	-	-	2 Dokumen	214,860,929	214,860,929	214,860,929
	2	16	03	2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkungan Pemda Kab. Kotabaru	54%	313,165,700	313,165,700	54%	542,874,715	542,874,715	229,709,015
					Sub Kegiatan :									
30	2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	85,314,346	85,314,346	2 Dokumen	181,177,346	181,177,346	95,863,000
31	2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah	1 Dokumen	141,108,359	141,108,359	1 Dokumen	209,812,389	209,812,389	68,704,030
32	2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	86,742,995	86,742,995	1 Dokumen	151,884,980	151,884,980	65,141,965
	2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Tingkat pencapaian penyelenggaraan statistik sektoral	100%	304,999,697	304,999,697	100%	459,798,996	459,798,996	154,799,299
	2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah	5 dokumen	304,999,697	304,999,697	5 dokumen	459,798,996	459,798,996	154,799,299
					Sub Kegiatan :									

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)		
33	2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kotabaru	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1	dokumen	109,999,903	109,999,903	2	dokumen	163,653,262	163,653,262	53,653,359
34	2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Kotabaru	Jumlah membangun metadata statistik sektoral	2	dokumen	119,999,993	119,999,993	2	dokumen	171,115,002	171,115,002	51,115,009
35	2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah	1	sosialisasi	74,999,801	74,999,801	1	sosialisasi	125,030,732	125,030,732	50,030,931
	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENYAMANAN INFORMASI	Kab. Kotabaru	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	62%		105,599,796	105,599,796	62%		119,658,526	119,658,526	14,058,730
	2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sistem Keamanan Informasi	68.97%		105,599,796	105,599,796	68.97%		119,658,526	119,658,526	14,058,730
						Sub Kegiatan :											-
36	2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	52	Laporan	48,806,650	48,806,650	1	Laporan	62,866,350	62,866,350	14,059,700
37	2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	30	Laporan	56,793,146	56,793,146	30	Laporan	56,792,176	56,792,176	(970)
TOTAL											9,650,960,237	9,650,960,237			14,524,790,963	14,524,790,963	4,873,830,726